

MDGs dan Beberapa Isu Ketenagakerjaan: Beberapa Catatan Awal^[1]

Uzair Suhaimi

uzairsuhaimi.wordpress.com

Isi: MDGs: Tinjauan Singkat, Kaitan Ketenagakerjaan dan MDGs, Masalah Ketenagakerjaan yang Serius, Pengalaman Indonesia, Beberapa Opsi Strategi Kebijakan

1. MDGs: Tinjauan Singkat

- MDGs merupakan produk dari kesepakatan dan resolusi global dari konferensi dunia yang diselenggarakan PBB tahun 2000.
- MDGs diterima secara luas sebagai suatu kerangka kerja untuk mengukur kemajuan pembangunan.
- MDGs memfokuskan pada upaya komunitas dunia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat secara nyata.
- Fokus MDGs adalah kemiskinan: MDGs terdiri dari 8 sasaran; 7 sasaran pertama yang saling memperkuat satu sama lain diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya. Sasaran terakhir, Goal-8, kemitraan global untuk pembangunan, merupakan suatu sarana untuk pencapaian 7 sasaran pertama.
- Beberapa butir MDGs relevan, langsung maupun tidak langsung, dengan isu-isu ketenagakerjaan

2. Kaitan Ketenagakerjaan dan MDGs

2.1 Sasaran-1 MDGs

Sasaran MDGs adalah pengurangan kemiskinan yang jelas terkait erat dengan isu ketenagakerjaan:

- Pada level rumah tangga: bagi rumah tangga umum

pendapatan/penghasilan daribekerja/berusaha merupakan sumber utama pendapatan; bagi rumah tangga miskin tenaga kerja (*labour*) merupakan aset utama (terkadang satu-satunya)

- Pada level kebijakan: ketenagakerjaan adalah sentral bagi pencapaian sasaran itu: salah satu pilar utama strategi penanggulangan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja/usaha,

2.2 Pengarusutamaan Ketenagakerjaan

Pengarusutamaan mungkin relevan untuk:

- Menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang juga harus konsisten dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan sektoral, dan
- Memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan mempertimbangkan komponen ketenagakerjaan (lihat Lindenthal, 2004)

2.3 Isu ketenagakerjaan yang relevan dengan MDGs

- Pembedayaan wanita (Goal-3), dan
- Penganggur berusia muda (Goal-8, lainnya),

Catatan: Goal-2, mengenai pendidikan, secara tidak langsung terkait dengan ketenagakerjaan: bagaimana “mengembalikan” pekerja anak ke habitat yang normal, lembaga sekolah

3. Masalah Ketenagakerjaan yang Serius

- Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang serius bukan hanya masalah penganggur, tetapi juga masalah setengah penganggur (berjumlah lebih besar dari penganggur dan menyebabkan tingginya angka persentase tenaga kerja yang tergolong miskin) dan kondisi kerja pekerja (lihat, a.l, Lindenthal, 2004), dan
- Masing-masing masalah itu jelas kompleks sehingga tidak ada opsi kebijakan yang sederhana.

4. Pengalaman Indonesia

Pengalam lima tahun terakhir: Pertumbuhan ekonomi “lumayan” tetapi ekspansi lapangan kerja “kurang lumayan”:

- Menegaskan bahwa mengatasi ketenagakerjaan tidak dapat “diserahkan” padapertumbuhan; ada ancaman “*jobless growth*”(?)
- Perlu kebijakan ketenagakerjaan dan pasar kerja yang eksplisit (walaupun secara teoritis tidak harus).

Catatan: konon tidak ada negara yang memiliki objektif ketenagakerjaan tanpa instrumen kebijakan tertentu yang spesifik,

5. Beberapa Opsi Strategi Kebijakan

5.1 Beberapa Opsi Strategi Kebijakan:

- Kebijakan makro-ekonomi yang berorientasi ketenagakerjaan, kebijakan sektoral, kebijakan mempromosikan jenis-jenis perusahaan/usaha tertentu (SMEs, perusahaan kecil, koperasi, dsb)
- Optimisasi kerangka kerja regulatori (tingkat fleksibilitas pasar yang pas masih harus dicari), termasuk mekanisme penetapan upah minimum
- Kebijakan pasar kerja yang aktif: penguatan sistem hubungan kerja industrial, peningkatan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, memastikan ketersediaan statistik yang terpercaya dan selalu terbaharui mengenai tenaga kerja, mempromosikan mitra kerja strategis dengan sektor dunia-usaha swasta, dsb

5.2 Strategi jangka pendek

Strategi Jangka Pendek: *Labour-intensive infrastructural programmes* (ILO, 1998):

- Melanjutkan program penciptaan lapangan kerja model JPS seperti P3T

(Penaggulungan Pengangguran Pekerja Trampil), PDKMK (Program Dampak Kekeringan dan Masalahketenagakerjaan), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak KrisisEkonomi)?

Catatan: Program PDKMK dinilai berhasil: target penciptaan lapangan kerja setara 28 juta orang-hari-kerja tahap-1 dan 23 juta o-h-k tahap-2, mencapai target 110% dan 88% dan menyerap 99.2% dan 78.9% alokasi budget (Irawan, 2001)

- Deregulasi dan promosi sektor informal
- Meyempurnakan sistem monitoring pasar kerja

5.3 Staretegi jangka menengah

Staretegi jangka menengah <— *demand side measures: to promote employment-friendly economic growth, to spur growth in domestic and export markets (ILO, 1998)*

- Memperbaharui pertumbuhan sektor pertanian: penyediaan input-dasar, diversifikasi, intervensi untuk penyesuaian harga produk pertanian,
 - o Merancang-ulang straregi industri yang memadai: mengurangi ketergantungan pada perusahaan “konglomerat”, mendorong pertumbuhan manufaktur kelas menengah, 50-200 naker (konon paling mampu menyerap naker lokal), skema garansi ketenagakerjaan,
 - o Upah minimum, penyempurnaan hubungan indurtrial, perbaikan kondisi naker wanita, pekerja anak

Referensi

BPS- Statistics Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2007, Jakarta: 2007

Irawan, Puguh, B., Erman A. Rahman, Haning Romdiati, Uzair Suhaimi, “2001 Anti Poverty Programs in Indonesia: Analysis, Prospects and Recommendations, BPS-Bappenas-UNESCAP: 2001

International Labor Force Office, “Employment Challenges of Indonesia Economic Crisis”, Jakarta: 1998

Lindenthal, Roland, "Social Policy in Indonesia: Concepts and Categories", Discussion Paper No. 04(November), Jakarta: UNSFIR: 2004

[1] Materi Diskusi Pengarusutamaan Target MDGs di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 11 Februari 2008